



Pemberdayaan Masyarakat Kampung Jepang Manukan dalam Perspektif ACTORS

Empowerment of the Manukan Japanese Village Community in the Perspective of ACTORS

Windriyani Maharani Senaen* & Dewi Casmiwati

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hang Tuah,
Indonesia

Abstrak

Penelitian ini menganalisis praktik pemberdayaan masyarakat di Kampung Jepang Manukan, Surabaya, melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori ACTORS (*Assets, Capacity, Transformation, Organization, Rules, Scale*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset utama kampung berupa ornamen tematik, lokasi strategis, dan UMKM kuliner yang dikelola secara swadaya telah mendorong transformasi signifikan dari permukiman biasa menjadi kampung wisata bernuansa budaya Jepang. Transformasi ini memberi dampak sosial, ekonomi, dan estetika, namun tingkat partisipasi masyarakat masih terbatas sekitar 50% dan lebih banyak didominasi pengurus RT. Struktur organisasi bersifat sentralistik dengan pola *top-down*, sementara peran pemuda dan karang taruna sebatas pelaksana teknis. Aturan internal berjalan secara informal berbasis kesepakatan sosial dan ditopang kepercayaan warga, sedangkan pendanaan dikelola transparan melalui iuran dan sumbangan. Skala dampak program masih bersifat lokal, namun berpotensi diperluas ke tingkat RW atau kelurahan melalui penguatan kelembagaan, partisipasi lintas generasi, serta strategi promosi yang lebih intensif.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat; Kampung Tematik; ACTORS

Abstract

This study analyzes community empowerment practices in Kampung Jepang Manukan, Surabaya, using a descriptive qualitative approach with the ACTORS (Assets, Capacity, Transformation, Organization, Rules, Scale) theory. The results show that the village's main assets, such as thematic ornaments, strategic location, and independently managed culinary MSMEs, have driven a significant transformation from an ordinary settlement into a tourist village with a Japanese cultural nuance. This transformation has social, economic, and aesthetic impacts, but the level of community participation is still limited to around 50% and is mostly dominated by neighborhood association (RT) officials. The organizational structure is centralized with a top-down pattern, while the role of youth and youth organizations is limited to technical implementation. Internal regulations operate informally based on social agreements and supported by community trust, while funding is managed transparently through contributions and donations. The scale of the program's impact is still local, but has the potential to be expanded to the neighborhood association (RW) or sub-district level through institutional strengthening, cross-generational participation, and more intensive promotional strategies.

Keywords: Community Empowerment; Thematic Village; ACTORS

How To cite: Senaen, W.M., & Casmiwati, D. (2025), Pemberdayaan Masyarakat Kampung Jepang Manukan dalam Perspektif ACTORS, *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1): 357-366.



PENDAHULUAN

Pemberdayaan memiliki pengertian yang luas namun biasanya dijelaskan dalam konteks subjek tertentu dengan sejumlah gagasan teoritis yang konsisten bahwa pemberdayaan terjadi dalam berbagai skala, mulai dari mikro hingga makro yang dapat terjadi pada tingkat individu, kelompok, atau komunitas karena pemberdayaan dapat bersifat konkret dan terukur menjadi suatu proses yang berkembang seiring waktu dan/atau suatu hasil (Coy et al., 2021). Mendorong masyarakat dari keadaan tidak berdaya menjadi berdaya dikenal sebagai pemberdayaan masyarakat yang berfokus dalam pengembangan kapasitas bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan (Sukoco, 2025).

Pemberdayaan individu mungkin tidak mampu menghasilkan kekuatan atau sumber daya yang digunakan untuk memengaruhi perubahan secara politik dan sosial, namun pemberdayaan secara psikologis terkait erat dalam proses pemberdayaan masyarakat karena muncul dari keterlibatan aktif dalam tindakan kelompok dan pengembangan kapasitas (Babatunde et al., 2022). Pembangunan yang melibatkan masyarakat secara langsung memberikan hasil yang jauh lebih baik dan efektif dibandingkan pembangunan yang menggunakan kerangka proyek karena kampung diberikan berbagai pilihan untuk mengelola rumah mereka sendiri dengan memberikan otonomi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan sesuai tuntutan masyarakat (Dionisius Jalung et al., 2025)

Berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan nasional harus partisipatif yang berarti masyarakat memiliki peran aktif termasuk dalam pemberdayaan mereka sendiri. Hal tersebut telah diterapkan pada salah satu kota metropolitan di Indonesia yaitu Kota Surabaya bahwa dalam pembangunan daerah secara komprehensif mencakup pemberdayaan masyarakat dalam berbagai domain baik pendidikan, ekonomi, sosial budaya, *gender*, pemuda, dan lingkungan yang menitikberatkan tranformasi sosial inklusif selaras dengan strategi terintegrasi guna menjadikan Surabaya kota yang inklusif, maju, dan berkelanjutan hingga 2045.

Program-program terkait dalam pemberdayaan di Kota Surabaya dilandasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang menjadi pedoman pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang setiap perubahan teknisnya diarahkan untuk memperkuat proses pemberdayaan dengan menguatkan kelompok masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan serta mengoptimalkan pencapaian manfaat sosial lewat berbagai program di kelurahan. Implementasi dalam program pemberdayaan masyarakat di Kota Surabaya salah satunya melalui program mengembangkan konsep Kampung Tematik sebagai strategi pemberdayaan ekonomi lokal, pelestarian budaya, dan pariwisata berbasis komunitas yang tercatat hingga tahun 2024 sekitar 44 kampung tematik di Kota Surabaya yang terbagi sebagai berikut:

Tabel 1 Tiga Kategori Utama Kampung Tematik Kota Surabaya

Kategori	Jumlah	Fokus Utama
Unggulan	21	Kuliner khas, budaya lokal, dan ekonomi kreatif
Wisata	17	<i>Heritage</i> , kerajinan, dan edukasi budaya
Ekologi	6	Teknologi hijau, kebersihan, dan pertanian organik

Sumber: Diolah penulis (2025)

Berdasarkan penjelasan tersebut terlihat keseriusan Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan sektor pariwisata kota serta menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat serta pelestarian nilai-nilai lokal melalui pelibatan aktif warga, komunitas, pelaku

UMKM, dan akademisi dalam perencanaan dan pengelolaan dengan melakukan pendekatan pembangunan kota yang berorientasi pada masyarakat dalam konteks urban. Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal dan membangun kemampuan mereka untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan (Fawaida & Subhi, 2024). Pada lingkungan perkotaan menjadi bukti bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan komponen penting dari inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan komunal dan memperkuat rasa kebersamaan dan kolaborasi (Febrianti & Casmiwati, 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan, 2022) mengenai *Sinergisitas dan Kolaborasi Stakeholder dalam Pengembangan Pariwisata Halal di Kota Pekanbaru* menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat urban, hingga pelaku usaha lokal. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi untuk mendorong pengambilan keputusan masyarakat dalam memilih destinasi wisata serta menciptakan nilai tambah bagi ekonomi lokal. Selanjutnya, studi yang dilakukan oleh (Sudrajat et al., 2023) dalam *Upaya Pengembangan Daerah Wisata: Strategi Pengembangan UKM Indonesia Melalui Kerjasama Perguruan Tinggi dengan Pemerintah* menegaskan bahwa kerjasama antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi berperan penting dalam memperkuat kapasitas pelaku UMKM di kawasan wisata. Penelitian ini menyoroti bahwa kolaborasi akademisi dan pemerintah melalui strategi pengelolaan kawasan wisata berbasis komunitas dapat meningkatkan daya saing UMKM serta mendukung keberlanjutan destinasi. Sementara itu, penelitian (Mulyanto & Rahayu, 2025) mengenai *Collaborative Governance Pengembangan Destinasi Wisata pada Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan Provinsi DKI Jakarta* memperlihatkan bahwa pengembangan destinasi budaya menuntut adanya tata kelola kolaboratif. Kolaborasi ini melibatkan pemerintah, masyarakat lokal, UMKM, tokoh budaya, media, serta akademisi, yang bersama-sama memperkuat ekosistem pariwisata berbasis budaya. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa sinergi antar-stakeholder merupakan prasyarat untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan sekaligus melestarikan nilai-nilai budaya lokal.

Kampung tematik yang telah berkembang secara signifikan di Kota Surabaya salah satunya adalah Kampung Jepang yang berlokasi di Manukan Lor Kecamatan Tandes Kota Surabaya dengan mengusung tema budaya Jepang dan sebagai daya tarik wisata beserta simbol akulturasi budaya dalam desain arsitektur, mural hingga suasana lingkungan. Keunikan kampung Jepang Manukan tidak hanya terletak pada visual dan estetikanya tetapi juga pada keterlibatan masyarakat dalam merancang dan mengelola ruang publik. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam praktik pemberdayaan masyarakat dengan mengidentifikasi aktor-aktor kunci yang terlibat dalam proses perubahan sosial di Kampung Jepang Manukan Surabaya dengan menggunakan pendekatan teori ACTORS.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus dalam memahami fenomena sosial secara mendalam yang lebih menekankan pada pemahaman terhadap realitas sosial dari sudut pandang partisipan di lapangan (Sugiyono, 2017). Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami praktik pemberdayaan masyarakat yang berlangsung secara nyata dan kontekstual di masyarakat perkotaan dengan menggunakan teori ACTORS (*Assets, Capacity, Transformation, Organization, Rules, Scale*) yang dikembangkan oleh Galloway dan ten Have (2000) telah diterapkan dalam berbagai studi pembangunan berbasis masyarakat. Teori ini menekankan bahwa pemberdayaan yang efektif mensyaratkan adanya pemanfaatan aset lokal (*assets*), penguatan kapasitas warga (*capacity*), transformasi sosial (*transformation*), penguatan struktur kelembagaan lokal (*organization*), penegakan aturan main sosial dan kebijakan (*rules*), serta pengelolaan skala dampak dan keberlanjutan (*scale*) (Galloway, 2002; Henderson, 2014; Robertson et al., 2012).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi dengan melibatkan informan yaitu Ketua RT, masyarakat sekitar serta anggota

Karang Taruna RT setempat. Data yang diperoleh dianalisis untuk menemukan pola pemberdayaan masyarakat sesuai dengan pendekatan teori *ACTORS* menggunakan teknik analisis data di antaranya yaitu pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclutions drowing/verifiying*) (Miles et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kampung Jepang berlokasi di Jl. Manukan Lor IV RT 05 RW 01, Kelurahan Banjar Sugihan, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya yang tergabung menjadi salah satu kampung tematik di Kota Surabaya dalam kategori wisata yang memadu padankan *heritage*, kerajinan, dan edukasi budaya yaitu dalam akulturasi budaya antara Negara Jepang yang dapat dinikmati di Indonesia. Kampung wisata tematik ini merupakan salah satu bentuk inisiatif warga yang menitikberatkan dalam pengembangan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dinamika sosial dalam kampung ini dijelaskan lebih rinci melalui pendekatan *ACTORS* (*Assets, Capacity, Transformation, Organization, Rules, Scale*) yang menyoroti keterlibatan aktor, aset lokal, proses perubahan, dan skala dampaknya.

1. Assets (aset)

Kampung Jepang memiliki aset utama berupa lokasi lingkungan kampung yang dikembangkan menjadi kawasan wisata dengan merangkul seluk-beluk budaya Jepang sebagai ilustrasi nyata bagaimana sebuah lingkungan yang khas dapat diubah menjadi destinasi wisata yang istimewa dengan sejumlah ornamen tematik, gapura mural, dan bangunan yang telah diubah untuk meniru arsitektur etnik Jepang yang sebelumnya menghiasi bagian depan kampung secara sederhana. Dekorasi inovatif yang terdapat di sepanjang jalan sebagian besar terbuat dari bahan daur ulang seperti gelas plastik dan botol air mineral habis bekas pakai bekas. Prosedur ini tidak hanya membuat kampung lebih menarik tetapi juga menunjukkan betapa kreatifnya masyarakat RT 05 dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Masyarakat RT 05 sendiri menyediakan hampir semua dana sekitar 90% dari kesediaan sukarela bentuk uang yang berasal dari sumber bantuan utama yaitu sumbangan pribadi, dana tunai RT 05, dan swadaya warga RT 05 untuk fasilitas dan dekorasi yang ada alih-alih dari sumber luar atau inisiatif resmi pemerintah hanya berfungsi sebagai pelengkap sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Kampung Jepang merupakan hasil dedikasi masyarakat untuk membangun kampung yang estetis sekaligus bernilai ekonomi. Selain aset berwujud warga RT 05 juga telah menciptakan aset ekonomi berupa kawasan kuliner swadaya yang mementingkan kesejahteraan lokal dengan uang yang dihasilkan dari usaha kuliner diinvestasikan kembali di lingkungan sekitar, mendorong bisnis masyarakat, dan mendorong kohesi sosial. Terlihat jelas bahwa masyarakat merupakan aktor utama dalam proses ini bahwa masyarakat bukan hanya menjadi objek pembangunan melainkan aktif menjadi pendorong di balik penciptaan, pemeliharaan, dan perluasan aset yang tidak hanya fokus pada komersialisasi melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip persatuan, identifikasi kelompok, dan keinginan untuk memanfaatkan UMKM guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

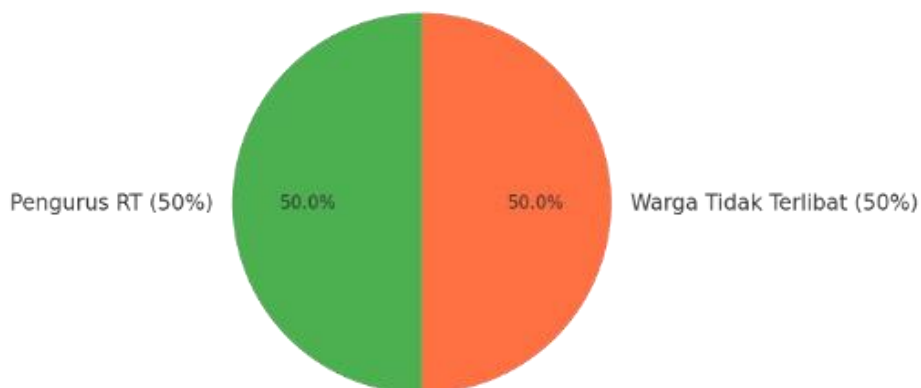


Gambar 1. Gapura serta ornamen tematik di Kampung Jepang
Sumber: Dokumentasi Penulis (2025)

2. Capacity (kapasitas).

Pengembangan kampung biasa menjadi kampung tematik berbasis wisata membutuhkan kapasitas masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan kampung, namun pada penerapannya di Kampung Jepang Manukan masih memiliki tingkat partisipasi yang kurang karena berdasarkan data di lapangan setelah mewawancarai Ketua RT 05 menghasilkan data bahwa hanya sekitar 50% keaktifan masyarakat yang ikut andil dalam mengelola Kampung Jepang Manukan dan terbatas pada pengurus kampung yang aktif. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapasitas kolektif belum maksimal karena belum melibatkan seluruh elemen masyarakat karena dengan adanya partisipasi yang minim dapat berdampak pada keberlanjutan program kampung Jepang Manukan. Masyarakat RT 05 masih pasif dan hanya ikut berkontribusi dengan bentuk uang tanpa ikut serta dalam proses pengelolaan lebih lanjut. Kondisi tersebut dihasilkan karena sebagian masyarakat lebih memprioritaskan pekerjaan utama sesuai dengan hasil wawancara dari lima masyarakat RT 05 yang tidak tergabung dalam pengurus aktif kampung bahwa keterbatasan waktu dan fokus dalam pekerjaan utama menjadi alasan mendasar dalam minimnya partisipasi masyarakat karena sebagian besar masyarakat bekerja dengan jam kerja yang cukup panjang sehingga partisipasi masyarakat hanya sebatas dalam pemberian sumbangan berupa uang.

Tingkat Partisipasi Masyarakat



Gambar 2. Persentase keterlibatan masyarakat RT 05
Sumber: Diolah penulis (2025)

Keterlibatan masyarakat dalam komposisi usia pengurus aktif yang menunjukkan keterlibatan paling besar adalah dari kelompok usia 30–50 tahun menjadi penggerak kegiatan yang menyebabkan regenerasi ide dan kepemimpinan belum terbentuk secara kuat sementara keterlibatan pemuda dan karang taruna RT 05 yang tergabung dengan komposisi usia 12 hingga 25 tahun karena apabila sudah menikah banyak dari masyarakat sudah tidak aktif dalam dalam karang taruna karena lebih fokus dalam mengurus rumah tangga sedangkan karang taruna yang aktif masih bersifat membantu pada tahap teknis dan eksekusi ide bukan sebagai aktor utama. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas pengelolaan masih didominasi oleh bapak-ibu pengurus dengan kapasitas sosial (koordinasi dan komunikasi) yang kuat tetapi kapasitas kelembagaan dan regenerasi partisipatif masih terbatas.

Distribusi Usia Pengurus Aktif



Gambar 3. Persentase Distribusi Usia Pengurus Aktif Kampung Jepang
Sumber: Diolah penulis (2025)

3. Transformation (Transformasi).

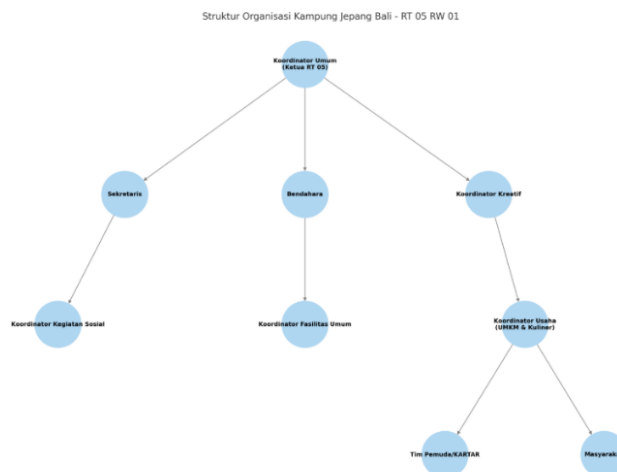
Transformasi yang terjadi di Kampung Jepang cukup signifikan dari permukiman biasa menjadi kampung wisata tematik. Perubahan ini muncul dari inisiatif masyarakat sendiri yang tidak berasal dari intervensi pemerintah atau pihak luar untuk menjadikan kampung sebagai kawasan kampung madani yaitu suatu kampung tidak hanya memperindah lingkungan tetapi juga menghasilkan aspek ekonomi dengan mendapatkan pemasukan untuk kampung dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat RT 05. Fokus utama adalah peningkatan kesejahteraan warga RT 05 dengan membuka ruang usaha di dalam kampung dan menekankan bahwa seluruh hasil penjualan menjadi milik penuh pemilik usaha sementara kontribusi dilakukan melalui iuran rutin ke perangkat RT. Tersedianya stan di area kampung sangat mempermudah karena masyarakat sebagai penjual tidak perlu berjualan jauh keluar kampung yang tentunya menambah beban pengeluaran sebagai hasil dari wawancara dari salah satu pedagang bahwa *“lebih enak jualan di stan yang ada dalam kampung jadi nggak perlu keluar ongkos kalau hujan ya tetep buka wong ya ada atapnya.”* Bagi masyarakat sebagai pembeli juga menyampaikan bahwa *“kalau beli di stan kampung kan dekat ga perlu naik motor bisa beli soto ayam dan bisa bantu tetangga.”* Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh bahwa terjadi transaksi di stan kampung yang menunjukkan bahwa transformasi Kampung Jepang Manukan bersifat sosial-ekonomi dan estetika lingkungan sekaligus menyatukan ikatan antarwarga. Transformasi ini menarik minat wisatawan berkunjung namun, saat ini Kampung Jepang tidak mengalami peningkatan wisatawan yang berkunjung menjadi tantangan ketidakberlanjutannya wisata bahkan ornamen dan gapura yang ada sudah tidak diperbarui lagi dan terlihat rusak.



Gambar 3. Kawasan kuliner UMKM RT 05
Sumber: Dokumentasi Penulis (2025)

4. Organization (Organisasi).

Struktur organisasi di Kampung Jepang bersifat sentralistik yang berpusat pada pengurus RT 05 yang merencanakan, memutuskan, dan melaksanakan semua program dan pengembangan kampung sedangkan ada peran pendukung dari pemuda dan karang taruna hanya sebagai pelaksana teknis dan kepemimpinan terpusat pada pengurus dewasa sehingga proses pengambilan keputusan bersifat *top-down* yang tidak melibatkan banyak ruang untuk dialog dua arah. Ini mencerminkan model organisasi berbasis komunitas dapat ditemukan di Kampung Jepang Manukan tetapi belum sepenuhnya kolaboratif atau partisipatif lintas generasi yang pasif dan cenderung mengelompok hanya pada satu lapisan masyarakat sehingga perlu dibuka ruang partisipasi yang lebih merata agar proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih banyak melibatkan generasi muda yaitu bagian dari Karang Taruna RT 05 dapat lebih mengembangkan Kampung Jepang Manukan lebih inovatif dan mengikuti *trend* sehingga target pasar yaitu wisatawan dapat meningkat karena Kampung Jepang Manukan bukan hanya menjadi suatu proyek milik pengurus RT melainkan kembali ke fokus awal yaitu menjadi karya bersama yang melibatkan aktif seluruh lapisan masyarakatnya.



Gambar 3. Struktur Organisasi Pengurus Kampung Jepang
Sumber: Diolah penulis (2025)

Penjelasan Struktur:

- a. Koordinator Umum / Ketua RT 05: Pemegang keputusan tertinggi, mengatur arah dan pengelolaan keseluruhan kampung tematik.
- b. Sekretaris & Bendahara: Bertanggung jawab atas administrasi dan keuangan kampung (iuran, donasi, dana kas).
- c. Koordinator Kreatif: Mengatur desain visual kampung (ornamen Jepang, mural, dan tema).
- d. Koordinator Kegiatan Sosial: Menyusun kegiatan pemberdayaan dan mengajak warga ikut terlibat.
- e. Koordinator Fasilitas Umum: Mengawasi infrastruktur kampung seperti kebersihan, gapura, dan sarana umum lainnya.
- f. Koordinator Usaha (UMKM): Bertanggung jawab atas pengelolaan kuliner dan pendampingan usaha milik warga.
- g. Tim Pemuda/Karang Taruna: Bertugas membantu eksekusi teknis kegiatan, dekorasi, kebersihan, serta publikasi.
- h. Masyarakat: Terlibat dalam pengawasan, gotong royong fisik, dan penyedia ide-ide lokal.

4. *Rules* (Aturan).

Aturan main dan kebijakan internal di kampung Jepang Manukan cukup jelas dan telah dipatuhi oleh masyarakat seperti iuran dari pelaku usaha, ketentuan penggunaan fasilitas, serta gotong royong dalam pembangunan dijalankan berdasarkan kesepakatan bersama namun, tidak ada aturan formal berupa dokumen tertulis karena aturan-aturan ini dijalankan secara sosial dan disepakati bersama secara informal seperti halnya dalam konteks aturan terkait penggunaan fasilitas umum mulai dari stan, area parkir, hingga ruang publik yang mengutamakan prinsip keadilan agar setiap warga mendapat kesempatan yang sama. Namun, peraturan tanpa dikodifikasikan dalam peraturan tertulis dapat efektif berjalan karena bergantung pada kepercayaan masyarakat bahwa setiap kontribusi yang diberikan untuk kepentingan bersama RT 05 sehingga kontrol sosial alami terbentuk secara alamiah dengan timbulnya kewajiban moral. Keberhasilan yang dapat dilihat adalah rasa tanggung jawab bersama masyarakat RT 05 sehingga kehidupan sosial ekonomi di Kampung Jepang Manukan dapat terkelola dengan baik tanpa pendekatan birokratis.

5. *Scale* (Skala Dampak).

Skala dampak dari kampung tematik ini bersifat lokal terutama terbatas pada warga RT 05. Sasaran ekonomi masih ditujukan bagi warga sekitar, dengan fokus pengembangan UMKM warga sendiri namun, potensi kampung ini sebenarnya dapat diperluas ke level RW atau kelurahan jika model pengelolaan diperkuat, partisipasi diperluas, dan promosi ditingkatkan. Secara sosial, kampung ini sudah mulai dikenal, tetapi belum menjangkau skala kota secara optimal dalam tingkat kota hanya termasuk dalam program kampung tematik namun, masih belum dikenal oleh seluruh masyarakat Surabaya bahkan wisatawan luar karena strategi promosi yang kurang dan kolaborasi antar lapisan masyarakat yang masih fokus dalam pengurus RT. Oleh karena itu, skala ini dapat ditingkatkan jika terjadi kolaborasi lebih luas dan penguatan kapasitas kelembagaan kampung ini dapat menjadi model pengembangan kampung tematik partisipatif di kota Surabaya.

SIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses multidimensional yang berlangsung pada berbagai skala mulai dari individu hingga komunitas, dan melibatkan pengembangan kapasitas serta keterlibatan aktif dalam pembangunan. Dalam konteks Kota Surabaya pemberdayaan masyarakat telah menjadi bagian integral dari strategi pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 dan diperkuat melalui

Peraturan Walikota Surabaya No. 28 Tahun 2023. Salah satu implementasi nyata dari upaya pemberdayaan ini adalah pengembangan Kampung Tematik termasuk Kampung Jepang di Manukan Lor yang menggabungkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya lokal.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Kampung Jepang Manukan berjalan dengan dinamika yang khas dalam pemanfaatan aset lokal seperti lokasi strategis, ornamen tematik, kreativitas dekorasi berbahan daur ulang, serta pengembangan kuliner swadaya telah berhasil menciptakan lingkungan yang estetis sekaligus bernilai ekonomi. Namun, kapasitas kolektif masyarakat masih terbatas, ditandai dengan partisipasi hanya sekitar 50% dan dominasi pengurus kampung sementara sebagian besar warga lebih memilih memberikan kontribusi dalam bentuk materi karena keterbatasan waktu dan prioritas pada pekerjaan utama.

Transformasi yang terjadi cukup signifikan, dari permukiman biasa menjadi kampung wisata dengan nilai sosial, ekonomi, dan estetika yaitu stan usaha memberi kemudahan bagi pedagang dan akses bagi pembeli sehingga tercipta timbal balik yang baik antarwarga. Meski demikian, stagnasi jumlah wisatawan dan kurangnya pembaruan ornamen menjadi tantangan keberlanjutan. Struktur organisasi pengelolaan masih bersifat sentralistik dan *top-down* dengan dominasi pengurus RT 05 sementara karang taruna lebih banyak berperan sebagai pelaksana teknis sehingga partisipasi lintas generasi belum optimal. Aturan main kampung berjalan secara informal melalui kesepakatan sosial dan diperkuat oleh kepercayaan warga sedangkan pengelolaan dana dilakukan secara transparan sehingga tetap menumbuhkan rasa kebersamaan tanpa dokumen formal. Skala dampak program masih terbatas pada warga RT 05 dengan fokus pada UMKM lokal, tetapi potensi untuk berkembang ke tingkat RW, kelurahan, hingga kota sangat besar jika penguatan kelembagaan, perluasan partisipasi, dan strategi promosi dilakukan lebih optimal.

Dengan demikian, Kampung Jepang Manukan dapat dikatakan sebagai inisiatif pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang kuat, namun membutuhkan penguatan partisipasi aktif, regenerasi kepemimpinan, serta kolaborasi yang lebih luas agar mampu berkelanjutan dan memberi dampak yang lebih besar. Dalam penelitian ini menghasilkan beberapa saran yang dapat dilakukan untuk mengembangkan lebih luas Kampung Jepang yaitu difokuskan pada perluasan partisipasi lintas kelompok, terutama generasi muda dan perempuan, agar tidak hanya didominasi oleh pengurus kampung usia 30–50 tahun. Keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat sangat penting untuk memperkuat kapasitas kolektif dan menjaga keberlanjutan program. Selain itu, struktur organisasi yang masih bersifat sentralistik perlu dibuka ruang kolaboratif yang lebih luas melalui penguatan kelembagaan lokal dan pelatihan partisipatif serta untuk menjaga transparansi dan kesinambungan aturan sosial yang selama ini bersifat informal juga perlu diresmikan melalui kesepakatan tertulis atau peraturan kampung. Pemerintah Kota Surabaya diharapkan mendukung pengembangan Kampung Jepang sebagai model kampung tematik dengan memperluas skala dampaknya melalui promosi, pendampingan, dan integrasi ke dalam program pembangunan kota sehingga menjadi contoh pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang inklusif dan berkelanjutan dengan mengembangkan kemampuan diri masyarakat serta sumber daya yang ada.

REFERENSI

- Babatunde, G. B., Schmidt, B., Gwelo, N. B., & Akintola, O. (2022). Defining, conceptualising and operationalising community empowerment: a scoping review protocol. *BMJ Open*, 12(5), 1–5. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-056152>
- Coy, D., Malekpour, S., Saeri, A. K., & Dargaville, R. (2021). Rethinking community empowerment in the energy transformation: A critical review of the definitions, drivers and outcomes. *Energy Research and Social Science*, 72(May 2020), 101871. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101871>

Windriyani Maharani Senaen, Dewi Casmiwati & Budi Rianto, Pemberdayaan Masyarakat Kampung Jepang Manukan dalam Perspektif ACTORS

- Dionisius Jalung, Sri Kamariyah, & Ika Devy Pramudiana. (2025). Community Empowerment Strategy in Tourism Village Development. *An International Journal Tourism and Community Review*, 2(1), 09–24. <https://doi.org/10.69697/tourcom.v2i1.197>
- Fawaida, A. A., & Subhi, M. R. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Pekerjaan Sebagai Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia Di Bendungan Desa Getas Gebyur. *MESTAKA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 185–189. <https://doi.org/10.58184/mestaka.v3i2.328>
- Febrianti, M. A., & Casmiwati, D. (2025). Pemberdayaan Perempuan Melalui Inovasi Urban Farming di Kampung Ijo Kelurahan Kendangsari Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(2), 1785–1793.
- Galloway, S., & Ten Have, P. (2000). The ACTORS framework for community-based development.
- Galloway, S. (2002). *The struggle for community-based health care: A case study of the Rainbow Valley Community Health Centre (Ontario)*.
- Henderson, J. (2014). *Towards a critical understanding of community anchors and a community sector theory and practice*. Heriot-Watt University.
- Kurniawan, W. (2022). *Sinergisitas dan Kolaborasi Stakeholder dalam Pengembangan Pariwisata Halal di Kota Pekanbaru*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Miles, M., Huberman, A., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook. In *SAGE Publications, Inc.* <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Mulyanto, Y. S., & Rahayu, N. S. (2025). Collaborative Governance Pengembangan Destinasi Wisata Pada Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan Provinsi DKI Jak. *Jurnal Pendidikan Dan Perhotelan (JPP)*, 5(1), 1–14.
- Robertson, P. J., Lewis, L. B., Sloane, D. C., Galloway-Gilliam, L., & Nomachi, J. (2012). Developing networks for community change: exploring the utility of network analysis. *Community Development*, 43(2), 187–208.
- Sudrajat, J., Rangkuti, A. H., Tjokrowerdojo, A. W., Morika, D., & Wijanto, N. M. (2023). Upaya Pengembangan Daerah Wisata: Strategi Pengembangan UKM Indonesia Melalui Kerjasama Perguruan Tinggi dengan Pemerintah. *Altasia Jurnal Pariwisata Indonesia*, 5(2), 67–75.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. ALFABETA.
- Sukoco, J. B. (2025). Community empowerment and creative economy. *International Journal of Science and Research Archive*, 15(March), 1040–1044.